KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Muhammadiyah Ancam Menggugat
Tanggal : Selasa, 25 Juni 2013
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

Muhammadiyah Ancam Menggugat

Terkait RUU Ormas yang Bakal Disahkan DPR

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin bersiap mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) apabila pemerintah dan DPR tetap ngotot mengesahkan Rancangan Undang-undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas). Menurut Din, RUU ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, tidak mengakui realitas yang berkembang dalam kehidupan nasional.

"Kami tetap pada keyakinan kami bahwa RUU Ormas yang saat ini masih ada di DPR sangat bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, Muhammadiyah dan ormas-ormas lain memiliki hak konstitusional sebagai warga negara, berhak untuk menggugatnya ke MK," ujar Din saat menggelar konferensi pers bersama ormas lintas agama di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/6).

Menurut Din, sikap Muhammadiyah dan ormas-ormas lain untuk menempuh jalur hukum demi membatalkan undang-undang tersebut, sudah dipikirkan matang-matang. Bahkan, Muhammadiyah sudah lama mengakajinya.

"RUU Ormas lebih untuk kepentingan rezim penguasa dan juga partai-partai politik. Bahkan di mata kami RUU ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi," ujarnya.

DOK/INDOPOS
Din Syamsuddin

Lebih lanjut, Din juga mengaku setuju bila motif pembentukan RUU tersebut oleh pemerintah dan DPR demi membidik ormas-ormas yang anarki. Namun dia tidak setuju bila penertiban itu menggunakan aturan baru dalam bentuk undang-undang. "Anarkisme itu harus dengan penegakan hukum, KUHP ditegakkan. Negara hadir akan selesai, atau memang negara tidak mampu atau tidak mau? Jangan berkelit untuk mengadakan RUU semacam ini," tegasnya.

Dia menambahkan, bila tetap dipaksakan maka pemerintah dan DPR buta mata hatinya, karena Muhammadiyah dan ormas lintas agama begitu getol menyuarakan ketidaksetujuan mereka. "Kalau DPR sensitif, aspiratif, benar-benar wakil rakyat, ya dengarkan aspirasi ini. Jadi jangan anggap remeh keberadaan kami. Ini jangan dianggap sedikit," pungkasnya.

Sementara itu, dilain pihak, Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung mengatakan, pimpinan DPR telah melakukan rapat terkait pembahasan RUU Ormas ini. Hasilnya, seluruh pimpinan setuju bahwa RUU Ormas akan disahkan menjadi UU dalam paripurna mendatang.

"Rapim (rapat Pimpinan-red) minggu lalu telah dibahas mengenai RUU tentang ormas, dan kami juga meminta pandangan dari Pansus Ormas. Mereka mengatakan secara keseluruhan apa yang menjadi keberatan dari ormas-ormas itu telah diakomodir dan diperbaiki. Kalau memang kemudian masih ada ormas yang keberatan tentunya ada ruang untuk melakukan *judicial review*," ujar Pramono Anung di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (24/6).

Menurut politisi PDIP ini, pembahasan RUU ini sudah delapan kali dan tidak mungkin tidak diselesaikan. Untuk itu, keputusan rapim pada waktu itu memutuskan diteruskan di dalam sidang paripurna untuk diputuskan.

"Ya, apapun ini harus diatur mengenai ormas. Kita mempunyai pengalaman yang namanya demokrasi dan partai saja sudah diatur. Ormas juga perlu pengaturan. Tentunya kami mengharapkan dampaknya itu memberikan manfaat bagi kehidupan ormas itu sendiri dan juga bagi masyarakat," jelasnya.

Karena itu, lanjutnya, kemungkinan, bagi ormas-ormas yang selama ini sudah berjalan dengan baik, seharusnya tidak perlu khawatir. Pimpinan DPR juga memberikan perhatian secara kusus terhadap RUU ini, dan melihat sudah tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan.

"Besok (hari ini-red) akan tetap disahkan. Kalau kemudian ada yang keberatan, ya monggo silakan ke MK," pungkasnya. **(dms)**

Perpustakaan DPR RI